

LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN



**PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DALAM  
RANGKA OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PADA UMKM.**

Oleh :

1. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.  
NIDN : 0008026102
2. Ety Mulyati, S.H.,M.H.  
NPM : 110130090018

Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2013  
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 2097/UN6.A/KP/2013  
Tanggal 29 Juli 2013

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DALAM  
RANGKA OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PADA UMKM.**

Oleh :

1. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.  
NIDN : 0008026102
2. Ety Mulyati, S.H.,M.H.  
NPM : 110130090018


Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2013  
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 2097/UN6.A/KP/2013  
Tanggal 29 Juli 2013

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD**

1. Judul Penelitian : Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit Dalam Rangka Optimalisasi Pembiayaan Pada UMKM
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN
  - b. NIDN : 0008026102
  - c. Jabatan Fungsional : Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  - d. No. HP : 08157178094
  - e. Alamat Surel (e-mail) : Nyulistio\_wati@yahoo.com
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
  - Anggota 1  
Nama Lengkap : Ety Mulyati S.H.,M.H.  
NPM : 110130090018
  - Anggota 2  
Nama Lengkap : -  
NPM : -
4. Lokasi Penelitian : Bandung-Jakarta
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan:
  - a. Nama Instansi : Fakultas Hukum Unpad
  - b. Alamat : Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung
6. Jangka waktu penelitian : 4 (empat) bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

  
Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H.  
NIP. 19650928 199001 1 002

Bandung,  
Ketua Peneliti,

Desember 2013

  
Dr. Nyulistiowati S.S.H., M.H.CN  
NIP. 19610208 198601 2 002

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.  
NIP. 19620527 198810 1 001

## RINGKASAN

Kegiatan usaha yang termasuk ke dalam golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut khususnya kredit perbankan sehingga diperlukan lembaga penjamin kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kedudukan Lembaga Penjamin Kredit dalam upaya optimalisasi pemberian kredit kepada UMKM, menganalisis bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit, dan merumuskan bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit.

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif sehingga dengan penarikan kesimpulan secara deduktif diperoleh suatu kesimpulan dengan mengacu pada penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, pertama, kedudukan Lembaga Penjamin Kredit (LPK) dalam upaya optimalisasi pemberian kredit kepada UMKM berkedudukan sebagai pengalih risiko yang menggantikan UMKM (debitur) melakukan pembayaran pada Bank. Kedua Tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit menjadi pihak yang menanggung utang UMKM dan berdasarkan prinsip subrogasi hak tagih Bank terhadap UMKM beralih kepada LPK, tetapi yang melakukan tagihan tetap pihak bank. Ketiga, Perspektif lembaga penjaminan kredit dalam upaya optimalisasi pembiayaan pada UMKM adalah, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah untuk menjadi LPK yang tangguh dengan permodalan yang kuat, sehingga diperlukan pengaturan yang khusus guna mengatur mekanisme penjaminan kredit serta bentuk hukum apa yang tepat bagi LPK sehingga merupakan lembaga yang mandiri dan tugasnya khusus memberikan penjaminan kepada bank atas kredit yang dikeluarkannya untuk UMKM.

## **SUMMARY**

*Business activities which belong to the class of Micro, Small and Middle Enterprises (UMKM) is a form of economic life most of the people of Indonesia, but the main problem faced by UMKM is weak capital structure and lack of access to strengthen the capital structure of the particular bank loan so that the necessary credit guarantee institution. The purpose of this study is to determine the position of the Credit Guarantee Board in an effort to optimize the provision of credit to UMKM, analyzes how the responsibilities if UMKM Credit Insurance Agency does not carry out its obligations to the bank as a lender, and formulate how responsibilities if UMKM Credit Insurance Agency does not perform its obligations to the bank as a lender.*

*Research methods used in conducting this research is a research method that promotes normative secondary data, the research is descriptive analytical specifications. Data were analyzed qualitatively to the conclusion deductively derived conclusions with reference to the interpretation of the law and construction law.*

*From this study we concluded that, first, the position of Credit Guarantee Institution (LPK) in an effort to optimize the provision of credit to UMKM serves as a diversion risk that replaces UMKM (debtor) to make payments to the Bank. Second, responsibilities if UMKM Credit Insurance Agency does not carry out its obligations to the bank as the lender into which a debt of UMKM and based on the principle of subrogation rights against the Bank's UMKM receivable transferred to LPK, but the bill still did the bank. Third, credit guarantee agency perspective in an effort to optimize the financing of UMKM is, full government support is needed to be a formidable LPK with strong capital, so it requires special arrangements to regulate the credit guarantee mechanism as well as what legal form appropriate for an institution that LPK independent and specific duties provide guarantees to banks on loans issued to UMKM.*

## PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Illahi Rabbi, karena berkat bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit Dalam Rangka Optimalisasi Pembiayaan Pada UMKM”. penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perusahaan, hukum perbankan dan hukum jaminan pada khususnya.

Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, selaku Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
2. Dr. Sigid Suseno, SH,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
3. Prof . Dr. Wawan Hermawan, MS., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung

Disadari oleh kami bahwa laporan penelitian ini belum sempurna, karena itu dengan senang hati kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Ringkasan	i
<i>Summary</i>	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
Bab II : Tinjauan Pustaka	
A. UMKM Sebagai Salah Satu Pelaku Ekonomi	8
B. Perbankan Sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan Yang Berperan Dalam Pengembangan Perekonomian	13
C. Lembaga Penjamin Kredit Sebagai Sarana UMKM Dalam Memperoleh Kredit Perbankan	26
D. Hukum Asuransi Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Risiko	33
Bab III : Kegunaan dan Manfaat	40
Bab IV : Metode Penelitian	42
Bab V : Hasil dan Pembahasan	
A. Kedudukan Lembaga Penjamin Kredit dalam upaya optimalisasi pemberian kredit kepada UMKM	47
B. Tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit apabila UMKM tidak melaksanakan kewajibannya kepada bank sebagai pemberi kredit	50
C. Perspektif Lembaga Penjamin Kredit dalam upaya optimalisasi pembiayaan pada UMKM	56
Bab VI : Kesimpulan dan Saran	
1. Kesimpulan	67
2. Saran	68
Daftar Pustaka	69
Lampiran	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang termasuk ke dalam golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi.

Fungsi dan peran dari usaha kecil ini sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi :<sup>1</sup>

1. Penyediaan barang dan jasa;
2. Penyerapan tenaga kerja;
3. Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah dan
4. Peningkatan taraf hidup

Nilai ekspor UMKM juga terus meningkat, karena di dalamnya terdapat ciri khas lokal Indonesia dan merupakan produk budaya (*culture product*). Sifat UMKM yang *flexible* serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bawah dan menengah, menjadikannya dapat dengan mudah berpartisipasi di dalamnya. Fleksibilitas yang dimiliki oleh UMKM dan tingkat skala yang kecil,

---

<sup>1</sup> Sutyastie Sumitro, *Analisis Ekonomi Jawa Barat*, Unpad Press, Bandung, 2003, hlm 270